

Mendorong Pemilu Berintegritas Mengawasi Korupsi Pemilu

Indonesia Corruption Watch
2014

Prinsip dan asaz Pemilu

- Jujur
- Adil

Pengertian Pemilu

- ❑ Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.
- ❑ Dari sisi elit, pemilu adalah mekanisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib.
- ❑ Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab.
- ❑ Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Tujuan Pemilu

❑ Keterwakilan Politik

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda (ideologi, oritensi politik, suku ras agama, dll), sehingga lembaga perwakilan rakyat benar-benar mencerminkan kondisi masyarakatnya

❑ Integrasi Nasional

Pemilu adalah sarana untuk mengkanalisasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat sehingga, potensi konflik dapat diredam dan disalurkan secara efektif lewat lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

❑ Pemerintahan Efektif

Pemilu adalah saran untuk membentuk pemerintahan yang efektif, karena pejabat-pejabat yang terpilih mendapat dukungan nyata (ligitimasi) dari masyarakat.

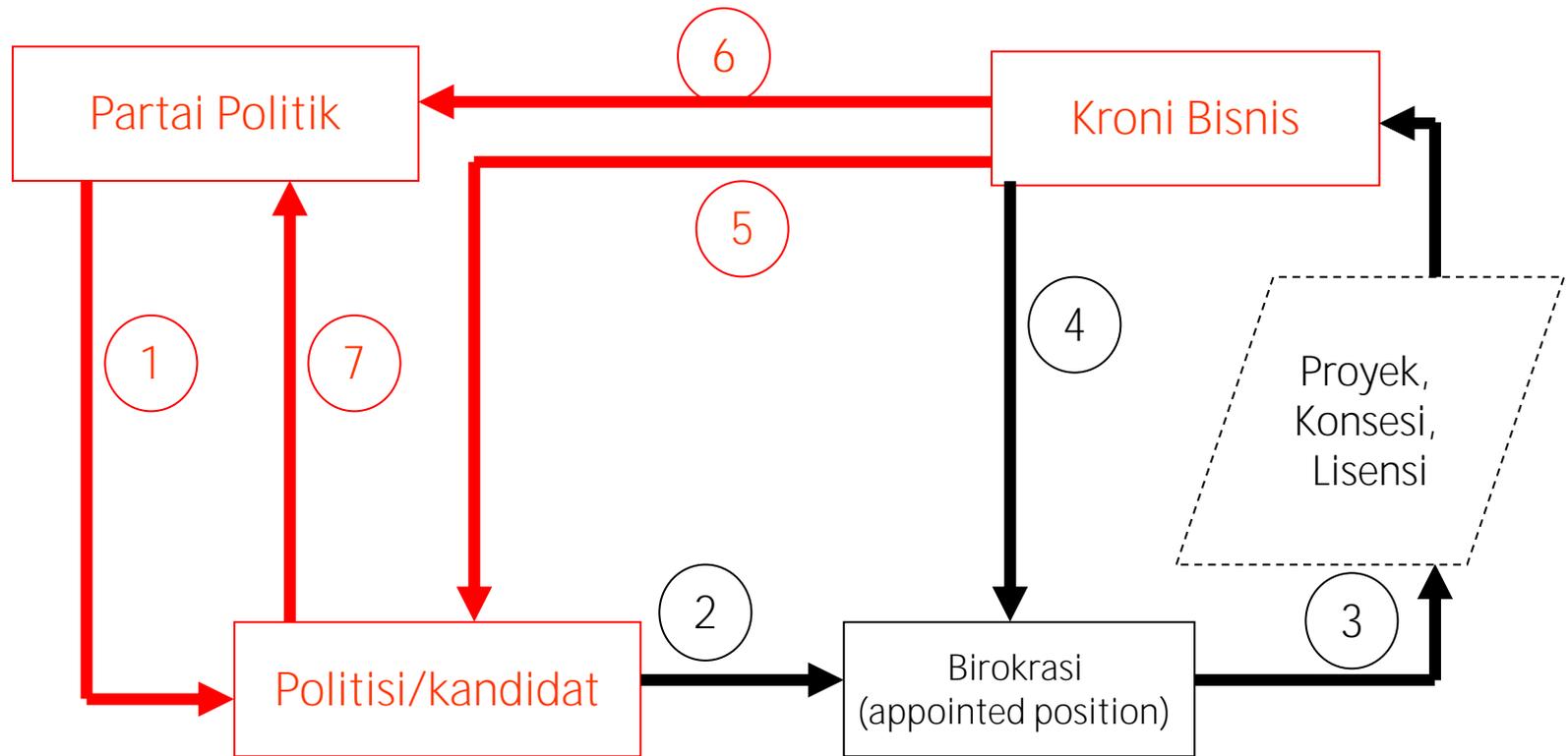
Isu Korupsi Pemilu

- Korupsi politik :
- Korupsi politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan (Hodess, 2004: 11). Dalam suasana persaingan tidak sehat, Politisi secara alamiah berusaha untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dan otoritasnya (Niskanen, 1973).

Pemilu dan Relasi Politik - Bisnis

- Politisi menempuh segala cara termasuk membangun hubungan erat dengan sektor bisnis. Kekuasaan dan otoritas politik digunakan untuk memberikan peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik. Hubungan erat antara politik dan bisnis ini menghasilkan kelompok yang disebut politico-business.
- Yoshihara Kunio (1990) memaparkan dengan jelas dalam bukunya "*ersatz capitalism*". Fenomena ini terjadi di banyak negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Para kroni menikmati proteksi dan kemudahan dari pemerintah dan sebagai imbal balik memberikan upeti. Hubungan tersebut dideskripsikan sebagai bentuk kolaborasi patron-klien (politico-business) dalam sistem kapitalisme negara.

Lingkaran Setan Korupsi Politik (Implikasi)



- **Nominasi**
- **Politisasi Birokrasi**
- **Kontrak, konsesi, lisensi**
- **Suap, kickback**
- **5. Sumbangan Pemilu, Suap**
- **6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying**
- **7. Setoran ke Partai**

Problem Rendahnya Integritas Pemilu

- Maraknya Praktek Politik Transaksional Negatif (Politik uang)
- Dana Kampanye Haram sebagai Modal Politik
- Penggunaan Fasilitas Negara dan Daerah sebagai Instrumen Pemenangan

Politik Uang

- Jenis Politik Uang :

Pertama, Politik Uang Kandidat terhadap Partai (jual beli nominasi kandidat/Candidacy Buying)

Kedua, Politik Uang Kandidat terhadap Pemilih (Vote Buying)

Ketiga, Politik Uang Terhadap Penyelenggara

Waktu Pendistribusian Politik Uang

- Pra bayar
- Pasca Bayar

Modus Politik Uang

No	Modus	Pelaku
1	Pembagian uang secara langsung	Tim Sukses dan simpatisan
2	Pembagian asuransi khusus ojek	Anggota partai, bagian dari
3	Pembagian sembako, mie, ikan.	partai, anggota dewan, dan
4	Pemberian kerudung, sajadah, helm dan berbentuk pakaian yang lain	bupati Calon
5	Pemberian bibit tanaman	Aparatur pemerintahan
6	Pemberian janji door price	(Camat, Lurah, RT,RW, dan
7	Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah	PNS)
8	Pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan	Lain-lain (Organisasi profesi,
9	Pembagian sembako dan sarung	masyarakat umum, dan tidak
10	Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama	jelas)
11	Mentraktir makan secara massal warga	Istri, anak dan yang
12	Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS	mempunyai kekerabatan
13	Pengobatan gratis	
14	Uang bakso	

Dana Kmpanye

Tujuan Pengaturan Dana Politik :

- Mendorong kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
- Mendorong sistem persaingan yang seimbang (*equal opportunity*)
- Sistem keuangan yang dapat mencegah korupsi (*investive corruption*) dengan membatasi partai/kandidat dari pengaruh berlebihan (kooptasi) donatur/penyumbang.
- Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari politik uang (*vote buying*).

Komponen Belanja Pemilu

1. Biaya pencalonan (mahar)/tiket perahu/candidacy buying
2. biaya tim sukses (tim kampanye);
3. biaya survey dan konsultan politik
4. Biaya pengadaan atribut kampanye;
5. biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka-tertutup termasuk mobilisasi massanya;
6. sumbangan ke kantong-kantong pemilih;
7. membeli suara (buying vote);
8. Biaya kampanye di Media (cetak maupun elektronik);
9. Biaya saksi dalam proses pemungutan suara;
10. Biaya Sidang MK

Prinsip Pengaturan Dana Kampanye

- Pengaturan menyangkut sumber
- Pengaturan menyangkut batasan
- Pengaturan soal larangan
- Pengaturan soal pencatatan dan pelaporan
- Pengaturan menyangkut lingkup dan penanggungjawab laporan
- Pengaturan sanksi administratif dan pidana

Kewajiban Dana Kampanye

Kewajiban Peserta Pemilu :

- Membuka Rekening Khusus Dana kampanye
- Melakukan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran
- Melakukan Pelaporan dana kampanye

Kewajiban Penyelenggara dan Pengawas :

- Menerima laporan
- Memerintahkan KAP untuk Mengaudit Dana Kampanye
- Memberikan Sanksi Administratif

Indikasi Selisih Belanja Dana Kampanye (Pileg 2009)

Laporan belanja DK Vs Belanjak aktual iklan media

No.	Partai Politik	Laporan Belanja Ke KPU dan KAP	Belanja Iklan Aktual
1.	PARTAI GERINDRA	Rp308.770.923.325	Rp151.211.000.000
2.	PARTAI DEMOKRAT	Rp234.632.119.225	Rp214.439.000.000
3.	PARTAI GOLKAR	Rp142.906.032.921	Rp277.291.000.000
4.	PKS	Rp36.258.788.361	Rp74.647.000.000
5.	PARTAI HANURA	Rp19.197.263.575	Rp44.796.000.000
6.	PAN	Rp17.858.157.150	Rp71.090.000.000
7.	PDIP	Rp38.944.436.113	Rp102.891.000.000
8.	PPP	18.338.239.000	Rp40.349.000.000

Fakta Dana Kampanye 2014

No.	Partai Politik	Dana Kampanye Pemilu 2009	DK Pileg 2014, Laporan Awal Periodik 3 Bulanan Per Desember 2013
1.	PARTAI GERINDRA	308.770.923.325	144.000.000.000
2.	PARTAI DEMOKRAT	234.632.119.225	135.000.000.000
3.	PARTAI GOLKAR	142.906.032.921	75.037.763.861
4.	PKS	36.258.788.361	32.000.000.000
5.	PARTAI HANURA	19.197.263.575	135.528.000.000
6.	PAN	17.858.157.150	86.342.968.557,-
7.	PDIP	38.944.436.113	130.000.000.000
8	PKB	3.609.500.000	54.204.938.236
9.	PPP	18.338.239.000	45.000.000.000
10.	PBB	10.953.625.927	29.600.000.000
11.	PKPI		19.000.000.000
12.	Nasdem		41.186.935.500

Problem

- Ada manipulasi dalam pelaporan
- Ada ketidak patuhan terhadap mekanisme pelaporan
- Kualitas pelaporan dana kampanye

Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Modus Pelanggaran Yang Perlu Diawasi

Dalam hal Penggunaan Fasilitas Langsung, modus pelanggaran yang terjadi antara lain:

- Penggunaan Fasilitas Kedinasan : kendaraan dinas Penggunaan rumah dinas, Penggunaan kantor-kantor pemerintah dan elengkapannya untuk kegiatan kampanye.
- Mengeluarkan Instruksi formal dan informasi yang dilakukan birokrasi terhadap Partai tertentu
- Mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu

Trend Dana Bansos Kementerian dalam APBN Tahun Anggaran 2013-2012-2011

No.	Kementerian	Tahun (dalam ribu)		
		2013	2012	2011
1	Kementerian Sosial	3.351.468.074	2.735.547.273	2.284.320.640
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	727.996.019	784.662.050	398.207.100
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	446.581.500	165.740.000	112.382.187
4	Kementerian Perumahan Rakyat	2.224.360.000	1.218.334.400	-
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	608.656.333	-	-
6	Kementerian Pekerjaan Umum	3.953.417.017	3286920110	2.874.321.348
7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.275.000	-	-
8	Kementerian Kehutanan	200.000.000	100.000.000	5.000.000
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.215.000	7.682.800	32.188.525
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22920294616	-	-
11	Kementerian Agama	11.312.042.045	5.559.902.259	8.107.020.092
12	Kementerian Pertanian	6.039.120.816	5.325.347.353	7.582.217.104
13	Kementerian Kesehatan	8.106.650.000	7.294.900.000	6.398.931.639
14	Kementerian Dalam Negeri	8.279.452.609	8.880.743.343	8.254.561.864
15	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.215.059.666	511.456.971	679.133.536
16	Kementerian Pendidikan Nasional	-	4.353.658.600	19.410.197.838
17	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	85.020.000	43.190.000
18	Kementerian Perdagangan	-	-	2.180.600
19	Kementerian Komunikasi dan Informasi	-	-	29.992.829
Jumlah Total Bansos (dalam ribu)		69.541.588.695	40.309.915.159	56.213.845.302

Penting Partisipasi Pengawasan Masyarakat

- Pengawasan Politik ung
- Pengawasan Dana Kampanye
- Pengawasan penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pemenangan

Agenda

- ICW dan Jaringan Pemantauan Pemilu Aceh Akan Mengawal Proses Pemilu Bersih 2014

Sekian dan terimakasih